

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara dapat didukung oleh berbagai faktor dan komponen negara salah satunya adalah faktor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan suatu pembangunan negara hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang tercatat dalam pembukaan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, pendidikan juga merupakan pondasi dan jalur utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter yang merupakan kunci dalam menentukan nasib suatu bangsa. Dalam kaitan ini, mutu pendidikan di Indonesia harus terus ditingkatkan agar bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Maka dari itu peranan pendidikan menjadi sangat krusial.

Pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU Sisdiknas, 2012:60).

Namun demikian pendidikan di Indonesia masih mengalami beberapa masalah yaitu dalam hal pemerataan, relevansi, efisiensi dan mutu pendidikan. Di dalam Tap MPR RI 1988 tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan. Peringkat mutu pendidikan The Learning Curve Pearson 2014 menyatakan bahwa Indonesia menduduki rangking terendahdapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
10 Peringkat Mutu Pendidikan Terendah di Seluruh Dunia

No	Negara	Rangking	Penilaian
1.	ROMANIA	31	-0,44
2.	CHILI	32	-0,79
3.	GREECE	33	-,086
4.	TURKI	34	-0,94
5.	THAILAND	35	-1,16
6.	COLOMBIA	36	-1,25
7.	ARGENTINA	37	-1,49
8.	BRAZIL	38	-1,73
9.	MEXICO	39	-1,76
10	INDONESIA	40	-1,84

<http://thelearningcurve.pearson.com/2014-report-summary/>

Berbicara mengenai mutu pendidikan, akan berkaitan langsung dengan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan. Pengelolaan belajar mengajar di sekolah sangat berarti dalam menentukan keberhasilan siswa. Dalam hal ini sekolah berperan penting dalam menciptakan siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan serta memiliki nilai religius dan nilai sosial yang tinggi. Dengan demikian sekolah adalah agen sosial yang harus diperhatikan dalam hal proses pembelajarannya.

Sekolah harus bermutu hal ini penting, untuk meyakinkan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan secara nasional atau pribadi. Dengan ini, Sallis (2008 hlm. 1) mengidentifikasi bahwa “bermutu berada di atas dari sebagian besar agenda dan peningkatan kualitas mungkin adalah tugas yang dihadapi lembaga yang paling penting”.

Menurut Sagala (2010, hlm 170), “mutu sekolah harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana.” Menurutnya, peningkatan mutu sekolah diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang

harus ditempuh mencapai mutu sekolah yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, dan peningkatan mutu sekolah yang berorientasi pada keterampilan hidup.

Sallis (2008, hlm.1) juga mengatakan bahwa “ada beberapa kandidat untuk sumber kualitas dalam pendidikan. Diantaranya adalah: guru yang berprestasi, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang sempurna, dukungan orang tua, komunitas bisnis dan lokal, sumber daya yang melimpah, penerapan teknologi terkini, kepemimpinan yang kuat dan penuh arti, perlindungan dan perhatian untuk murid dan siswa, dan kurikulum yang seimbang dan menantang.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka satuan lembaga pendidikan dituntut untuk meningkatkan mutu lembaganya pada masing-masing jalur, jenjang dan jenis. Tak terkecuali pada jenjang pendidikan menengah, yakni pada sekolah menengah kejuruan (SMK). SMK adalah salah satu bentuk satuan [pendidikan formal](#) yang menyelenggarakan [pendidikan kejuruan](#) pada jenjang [pendidikan menengah](#) sebagai lanjutan dari [SMP/MTs](#) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. SMK harus menyiapkan peserta didiknya agar mempunyai keterampilan sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat menengah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka sekolah membutuhkan perencanaan yang matang, salah satunya dengan meningkatkan kinerja sekolah melalui sistem manajemen terpadu.

Dalam lingkup menilai mutu sekolah seperti dikemukakan diatas tentu harus ada penilaian mutu secara keseluruhan atau terpadu yaitu melalui penilaian mutu input proses dan outputnya.

Koswara dan Triatna (2010, hlm 275) menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi *input*, *proses*, *output* maupun *outcome*. *Input* pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu, dan berbagai aspek penyelenggara pendidikan yang bermutu. *Proses* pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. *Output* pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Dan *outcome* pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri.

Masih terdapat banyak masalah terkait mutu sekolah di SMK diantaranya kurangnya minat peserta didik lulusan SMP sederajat yang mau melanjutkan ke SMK sesuai dengan data dinas pendidikan tahun 2015/2016 jumlah siswa yang terserap di SMA sebanyak 63.090 siswa sedangkan SMK sebanyak 57.913.

Selain dari pada itu kualitas sekolah juga dapat dinilai dari mutu proses, dimana guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Mengutip dari penelitian Santoso (2014) bahwa “Di Kota Bandung, Kasubdit Banglemsidiklat (2005: 1) yang menyatakan bahwa 63% guru SMK tidak memiliki kompetensi profesional standar yang disyaratkan.”

Menurut data badan pusat statistik angka putus sekolah pada tahun 2015 usia 7-12 tahun mencapai 0,67% atau 182,773 anak; anak 13-15 tahun sebanyak 2,21% atau 209,976 anak; dan usia 16-18 tahun mencapai 3,14 persen atau 223,676 anak. Apabila melihat data tersebut maka angka putus sekolah tertinggi ada pada usia 16-18 tahun atau setara pada ting SMK sederajat.

Hal ini menunjukkan bahwa mutu *input* di SMK Kota Bandung masih rendah. Terdapat pula masalah dari mutu lulusan (*output*) SMK di Kota Bandung yakni ujian nasional pada tahun 2015/2016 SMK di Kota Bandung dinyatakan lulus 100%, namun hal ini masih belum dapat dikatakan sebagai mutu *output* yang baik, karena masih ada siswa dengan perolehan nilai Ujian Nasional sebesar 1,25 (Data statistik SMK Negeri 3 Bandung).

Sedangkan mutu *outcome* dari SMK masih mewarnai rendahnya mutu sekolah atau pendidikan di Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2015 mencapai 7,56 juta orang atau bertambah 320 ribu orang terhadap Agustus 2014. Pengangguran paling banyak terjadi pada lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) SMK mencapai 12,65 persen dari total jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran SMK bahkan terus meningkat jika dibandingkan dengan periode Agustus 2014 yang sebesar 11,24 persen dan Februari 2015 9,05 persen. Sedangkan di urutan kedua, jumlah pengangguran paling banyak ditempati lulusan sekolah menengah atas (SMA) sebesar 10,32 persen. Kemudian secara berturut-turut diikuti lulusan diploma I/III 7,54 persen,

universitas 6,40 persen, sekolah menengah pertama 6,22 persen dan sekolah dasar ke bawah 2,74 persen. (REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA : 5 November 2015).

Masalah yang sangat krusial di Kota Bandung pada tahun 2015/2016 adalah adanya kebijakan wali kota Bandung terlampir dalam peraturan wali kota no.361 tahun 2015 yang menyatakan bahwa:

“Jika animo warga miskin di suatu sekolah tertentu (terutama sekitar pamukiman mayoritas warga miskin) tinggi, daya tampung jalur warga miskin pada sekolah tersebut dapat bertambah dari alokasi daya tampung 20% sesuai kondisi riil, diusulkan sebelum pelaksanaan seleksi PPDB *online* jalur non Akademis untuk disetujui oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan/atau Kepala Sekolah tersebut membantu menyalurkan ke sekolah terdekat dalam wilayah yang sama yang kuota warga miskinnya belum terpenuhi”

Peraturan inilah yang ramai di perbincangkan karena warga yang menggunakan jalur SKTM (warga miskin) membeludak, sehingga membuat sekolah kewalahan serta karena kelengahan sekolah dalam seleksinya hingga mutu siswanya tidak diperhatikan. Karena kebijakan ini pula berdampak pada sekolah-sekolah SMK di Kota Bandung. Salah satunya terdapat $\frac{3}{4}$ jumlah peserta didik baru yang terserap tahun 2015/2016 di SMK Negeri 3 Bandung yang merupakan siswa miskin yakni sebanyak 632 dari 830 siswa merupakan siswa miskin. siswa jalur SKTM ini diterima di sekolah-sekolah terutama di SMK tanpa memperhatikan passing grade atau standar nilai yang telah ditentukan sekolah, sehingga berdampak pula pada kualitas siswa dan prestasi sekolah nantinya.

Hasil dari PPDB tahun 2015 ini masih berdampak hingga saat ini, dimana sekolah-sekolah SMK yakni dengan proporsi siswa miskin mendominasi mengakibatkan terhambatnya pemasukan biaya dari orangtua (DSP) yang mayoritas berlatar belakang ekonomi kelas menengah kebawah yang berdampak pula terhadap tersendatnya alokasi biaya untuk program-program serta kegiatan, kepala sekolahpun selaku pucuk pimpinan dibingungkan dalam pengalokasian serta harus memanaj dana yang ada dengan program yang telah ditentukan. Bagaimana dalam membagi dana untuk program peningkatan mutu siswa, PTK, sarana prasarana, dan mutu lainnya.

Dari berbagai penjelasan yang ada diatas, sistem kendali mutu dan jaminan kualitas mutu pendidikan menjadi isu yang utama dalam kontek

Siti Nurlatifah, 2016

PENGARUH MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TERHADAP MUTU SEKOLAH PADA SMK DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendidikan saat ini. Mutu pendidikan yang kasat mata tentunya tertuju pada mutu lulusan dari pendidikan itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan lulusan yang bermutu tentunya harus didukung oleh sebuah proses yang bermutu juga. Sebuah proses pendidikan yang bermutu tentunya harus didukung oleh faktor-faktor penunjang proses pendidikan yang bermutu pula.

Menurut Hoy dan Miskel (2008), banyak faktor yang mempengaruhi mutu sekolah diantaranya budaya organisasi, kepemimpinan kepala sekolah, iklim organisasi, sarana-prasana, kinerja guru, dan pembiayaan.

Biaya dan mutu sekolah mempunyai keterkaitan secara langsung. Menurut Morphet (1983, hlm 83), “biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu.” Menurut Sagala (2010, hlm 171), “nilai ujian akhir sekolah bagi setiap peserta didik bukan satu-satunya indikator untuk menentukan kualitas sekolah.” Hal tersebut dimaksudkan bahwa masih terdapat faktor lain yang menentukan mutu sekolah. Disamping hasil UN, adanya anggapan masyarakat mengenai pembiayaan pendidikan yang akan menentukan kualitas pendidikan.

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1291/D5.5/KU/2015, maka dihasilkan data penerima dana BOS pada SMK per siswa pertahun adalah sebesar Rp. 600.000,- apabila dibandingkan dengan dana untuk tingkat SD dan SMP sederajat SMK masih tergolong kecil dengan kebutuhan yang besar.

Dana tersebut memiliki aturan baku yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur alokasi dana. Dana BOS yang masih tergolong kecil tidak dapat memenuhi kebutuhan yang besar maka dibutuhkan dana yang bersumber dari orangtua siswa. Hal ini pula yang menuntut kepala sekolah selaku pengambil keputusan harus dapat melakukan fungsi manajemennya terhadap pembiayaan sekolah secara optimal.

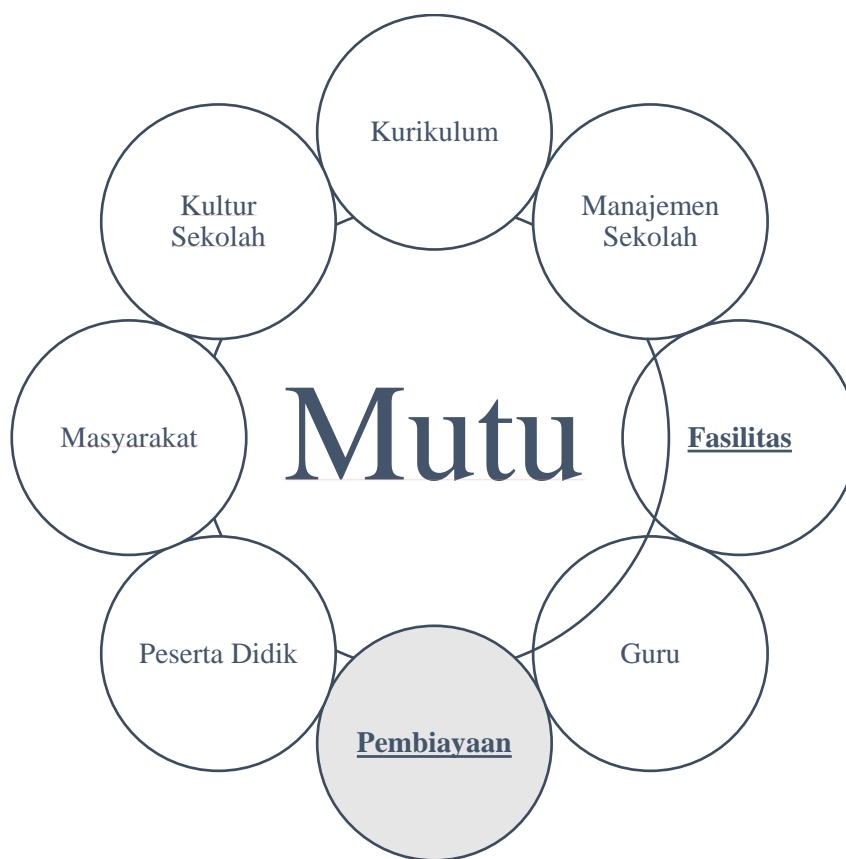
Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan

pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.

Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah pada SMK di Kota Bandung”.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas. dapat dijabarkan bahwa ruang lingkup permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai kajian mutu sekolah. Khususnya pada faktor-faktor strategik yang berpengaruh pada mutu sekolah. Untuk mencapai mutu sekolah yang diharapkan tidak terlepas dari ketiga hal tersebut. Dalam penelitian ini. mutu yang diteliti meliputi mutu pada sisi *output*. Dimana mutu sekolah sebagai produk yang dihasilkan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan. Untuk mencapai *output* pendidikan yang bermutu dibutuhkan *input* dan *proses*. *Output* dan *outcome* pendidikan yang bermutu akan dihasilkan dari *proses* yang bermutu. Di bawah ini adalah grafik identifikasi masalah yang telah dirangkum dari beberapa temuan pada latar belakang. diantaranya Ali (2007. hlm 361) menyatakan bahwa mutu sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor strategik seperti yang digambarkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1: Faktor-faktor strategik yang mempengaruhi mutu sekolah (Ali. M, 2007. hlm 361)

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas dua faktor strategik sebagai variabel yang dapat mempengaruhi mutu sekolah, yaitu manajemen pembiayaan. Pemilihan faktor strategik tersebut didasarkan oleh fenomena dan permasalahan yang ditemukan penulis dari lapangan. Permasalahan yang ditemukan penulis adalah masih rendahnya mutu sekolah pada jenjang SMK di Kota Bandung. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya manajemen pembiayaan pendidikan pencapaian tujuan pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen

pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah, “Apakah pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah?” berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan pada SMK di Kota Bandung?
2. Bagaimana mutu sekolah pada SMK di Kota Bandung?
3. Seberapa besar Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah pada SMK di Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah pada SMK di Kota Bandung.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Teridentifikasinya manajemen pembiayaan pendidikan pada SMK di Kota Bandung.
- 2) Teridentifikasinya mutu sekolah pada SMK di Kota Bandung.
- 3) Teranalisisnya pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah pada SMK di Kota Bandung.

E. Mantaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi kajian dan pengembangan keilmuan, khususnya dibidang administrasi pendidikan, yang terkait dengan mutu sekolah.
- b) Bagi peneliti, dapat memberikan nilai tambah dalam menganalisis berbagai permasalahan, dalam pengelolaan manajemen persekolahan, khususnya manajemen pembiayaan pendidikan kaitannya dalam peningkatan mutu sekolah dan akan menambah wawasan berfikir dalam upaya memahami serta memecahkan persoalan pendidikan yang senantiasa menjadi tuntutan yang terus berkembang tiada berhenti dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu yang relevan dengan bidang studi yang sedang ditekuni, yaitu administrasi pendidikan.
- b) Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan khususnya manajemen pembiayaan pendidikan yang diterapkannya dalam rangka peningkatan mutu sekolahnya.
- c) Bagi praktisi pendidikan, sebagai bahan masukan kepada para praktisi pendidikan bahwa tujuan pendidikan nasional akan tercapai bila didukung oleh mutu sekolah yang baik dengan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik pula.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Pembuatan skripsi ini tentunya memiliki struktur organisasi atau sistematika penulisan yang sudah ditetapkan dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015. Dalam skripsi ini, terdapat beberapa komponen yang saling terintegrasi satu sama lain yang disusun secara terarah dan sistematis mulai

Siti Nurlatifah, 2016

PENGARUH MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TERHADAP MUTU SEKOLAH PADA SMK DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dari BAB I sampai dengan BAB V. Adapun struktur organisasi skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I berisi uraian tentang Pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi yang terdiri dari:

1. Latar Belakang Penelitian
2. Rumusan Masalah Penelitian
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Struktur Organisasi Skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Premis, berisi mengenai landasan teori yang menjadi dasar penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan premis.

BAB III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang terdiri dari :

1. Metode Penelitian
2. Desain Penelitian
3. Devinisi dan Operasionalisasi Variabel
4. Populasi dan Sampel
5. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen
6. Teknik dan Analisis Data Penelitian

Dalam pengolahan data pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dan analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, adapun *software* yang digunakan adalah *SPSS for Windows* dan *Microsoft Excel*.

BAB IV berisi tentang Temuan dan Pembahasan yang terdiri dari :

1. Temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian
2. Pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan

Siti Nurlatifah, 2016

PENGARUH MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TERHADAP MUTU SEKOLAH PADA SMK DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi, berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan rekomendasi yang diberikan sebagai perbaikan penelitian selanjutnya

Siti Nurlatifah, 2016

PENGARUH MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TERHADAP MUTU SEKOLAH PADA SMK DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu